

**PARADIGMA DEPENDENCIA DALAM MEMAHAMI REALITAS
KEMERDEKAAN BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PASCA REFORMASI 1998 :**

**(Kajian Awal Tri-Sakti Bung Karno untuk Rekonsolidasi Kembali pada
“REL” Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Ideologi Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta suatu upaya *Rediscovery of Our Revolution*)**

Ganjar Razuni *
ganjarrazuni@yahoo.com

Abstract

Indonesia's political reform starting in 1998 has been a crucial path that poses problematic especially in terms of economic ideology and its road to development. This paper is an account that seeks to critically look into the negative move to ultra-liberal inclination of the reform with close collaboration with powerfully financial forces. The theories used are dependency theory and Feith & Castles's concepts of five interwoven ideologies in Indonesia's politics. It is the writer's solution to the problem to endorse President Joko Widodo's adoption of Sukarno's Nawacita that calls for the path of self-reliant development and guarantees the re-invention of political philosophy of Pancasila.

Key words: Nawacita, ultra-liberalization of politics, endorsement of self-reliant development

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan politik di Indonesia sangat cepat bergerak ke pendulum demokrasi. Perubahan itu dimulai dari penyusunan kembali konstitusi, diikuti oleh undang-undang yang menjabarkannya sampai tataran operasional. Hingga pertengahan tahun 1990-an, indonesianis asal Amerika Serikat, Bill Liddle (1996), tidak percaya perubahan berlangsung secepat yang terjadi.

* Lektor Kepala dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (*bersertifikasi nasional*) / Dosen Tetap FISIP Universitas Nasional 1992-sekarang, Mantan Anggota DPR/ MPR RI; Mantan Staf Khusus Ketua DPR RI Bidang Sospol dan Sosbud; Mantan Staf Khusus Menko Kesra RI Bidang Sospol dan Sosbud (*Pejabat Eselon I*); Wakil II Sekretaris Jenderal KONI Pusat 2007-2015; Ketua Wanhat di beberapa Organisasi Induk Cabang Olahraga Tingkat Nasional; dan Ketua Korbid Ideologi dan Politik DPP Partai GOLKAR/ Ketua Korwil Jawa Timur DPP Partai GOLKAR (MUNAS Jakarta).

Dinamika yang berlangsung di tingkat bawah sejalan dengan dinamika di tingkat elit, sehingga keputusan elit memperoleh dukungan luas. Perubahan politik ke arah demokrasi ini oleh para peneliti dinilai sebagai “sungguh mengejutkan” (Horowitz, 2014:30). Oleh karena sejumlah literatur yang muncul dari hasil penelitian, tidak memberi penjelasan yang mendukung untuk kasus Indonesia.

Pada tahun 1984, ilmuwan politik kesohor, Samuel Huntington (1991) menyatakan bahwa negara-negara dengan penduduk Muslim kecil kemungkinannya melakukan demokratisasi. Begitu pula hasil penelitian Larry Diamond (1996) yang menyoroti khusus Indonesia sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia sama sekali tidak memperlihatkan prospek demokrasi dalam waktu dekat. Penelitian Uhlin (1995) untuk mempelajari prospek demokrasi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan gelombang demokratisasi ala Huntington, juga berkesimpulan sama bahwa berseraknya oposisi di negeri ini belum memberi sinyal akan jatuhnya rejim. Bahkan juga belum menunjukkan transisi ke arah demokrasi, oleh sebab itu ia mengajukan argumen bahwa yang sedang terjadi di Indonesia adalah “pra-transisi”.

Tetapi proses politik di negara ini membalik argumen para teoritis tersebut. Oleh karenanya proses demokrasi di negeri kita sering dijuluki “penyimpangan” (Horowitz, 2014:12). Pertama, sampai dengan pertengahan tahun 1998, tidak ada perpecahan serius di kalangan elit politik. Pemerintahan Soeharto tetap mempertahankan pola otokratis dan personalistik, sehingga tidak ada ruang bagi kaum reformis untuk negosiasi kekuasaannya. Kedua, oposisi sangat lemah dan terpecah-pecah sehingga tidak mampu memunculkan pemimpin tunggal yang mampu mewakili seluruh oposisi. Islam sebagai kekuatan sosial terbesar, sulit bersatu antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, buruh lebih terpecah lagi dalam ideologi dan kepentingan yang sempit (Rochadi, 2009), partai di luar pemerintah, tidak mampu membangun komunikasi politik dengan khalayak, sehingga bukan pilihan utama di luar Golongan Karya.

Namun demikian di luar dugaan banyak orang, rezim Orde Baru mengalami *political decey* (pembusukan politik) dari dalam yang ditandai dengan melemahnya dukungan ABRI kepada Presiden Soeharto dan mundurnya 14 orang Anggota Kabinet, selain adanya faktor eksternal elit, aialah, krisis moneter, berlanjut pada krisis ekonomi, krisis kepercayaan dan krisis nasional yang berujung pada keruntuhan rezim Presiden Soeharto. Sesuah itu masyarakat tentu saja berharap begitu banyak atas proses perubahan itu, sehingga terjadilah apa yang disebut sebagai “*ledakan-ledakan*” harapan masyarakat yang luar biasa besarnya, mengharapkan transisi dan proses demokratisasi itu melahirkan perubahan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, hukum dan politik, atau sustu sistem

demokrasi yang mampu menghadirkan kesejahteraan sosial, keadilan sosial dan juga suatu kemandirian bangsa

Ternyata apa yang terjadi pasca reformasi ini, tampak tidak sejalan dengan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat, baik dibidang ekonomi, politik, hukum dan dalam hal kemandirian bangsa. Dalam bidang politik, pasca keruntuhan rezim Orde Baru, belum pada pembentukan proses dan sistem demokrasi yang substansial, atau setidaknya belum mengarah pada hakikat demokrasi substansial, namun baru pada tataran dan proses demokrasi prosedural. Demokrasi dipandang belum mampu, menghadirkan kesejahteraan sosial, keadilan sosial dan kemandirian bangsa. Pada hemat penulis saat ini, kehidupan demokrasi kita baru sampai pada taraf menghadirkan Indonesia sebagai *Electoral State*. Dalam bidang ekonomi, yang terjadi justru liberalisasi ekonomi dalam segala bidang yang seringkali "*berkedok*" pada privatisasi BUMN dan meningkatnya ketergantungan ekonomi Indonesia pada luar negeri, membengkaknya import-import bahan pangan dan banyaknya Bank-Bank Swasta Nasional yang kemudian menjadi Bank Swasta Asing karena saham swasta nasional kita, tidak lagi mayoritas. Contohnya, dulu ada Bank Danamon, sekarang menjadi UOB, Bank Niaga menjadi CMIB sesudah sahamnya dibeli oleh swasta asing, masih banyak contoh yang lain, khususnya dalam pengelolaan sumberdaya alam. Dalam bidang hukum, terjadi situasi, bahwa hukum itu, *tajam ke bawah dan tumpul ke atas*. Dalam bidang budaya, terlihat makin merosotnya nilai-nilai budaya tradisional dan mengautnya pengaruh barat dan makin mengautnya semangat individualism.

B. Identifikasi Masalah

Saat ini kita telah berada di posisi 18 tahun atau hampir dua dasawarsa terjadinya reformasi yang menjadi harapan rakyat datangnya keadaan yang lebih baik. Pasca Reformasi 1998 itu, kita telah memiliki 5 orang Presiden dan 4 orang Wakil Presiden RI. Miskinnya visi besar dalam Reformasi 1998, menyebabkan proses demokratisasi itu menjadi menguatnya liberalisasi ekonomi, politik dan hukum, privatisasi/ individualisasi badan-badan ekonomi publik, dis-integrasi ekonomi nasional, dan munculnya suatu neo-devide et impera dalam pengelolaan sumber daya alam. Pertanyaanya adalah;

1. Mengapa terjadi neo-liberalisasi dalam berbagai bidang ekonomi, politik, sosial dan hukum pasca Reformasi 1998?
2. Mengapa Indonesia menjadi makin tergantung pada kekuatan dan potensi asing dalam mengatur berbagai sumber daya alam yang seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?
3. Bagaimana kondisi struktur dan karekter elit strategis nasional kita dalam arus neo-ultra-liberalisasi yang melanda negeri ini?

C. Paradigma Dependencia sebagai Salah Satu Konsep Dasar Ilmu Politik dalam Memahami Kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia Pasca Reformasi 1998

Kondisi Indonesia pasca Reformasi 1998 dapat “*dipotret*” dengan menggunakan Paradigma *Dependencia* atau Teori Ketergantungan. *Species* aumsi-asumsi konseptual dari bangunan teori ketergantungan, termasuk dalam lingkup teori-teori kiri, yang fokusnya meneliti dari pola-pola hubungan antara negara-negara dunia pertama dengan negara-negara dunia ketiga (Miriam Budiardjo: 2010). Disebut teori kiri, oleh karena pendekatan teori ini, berorientasi pada kondisi dan bangun struktural tata hubungan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang; pada ketimpangan struktural dalam tata hubungan dunia dan; pada pemikiran, strategi dan cara melakukan perombakan atas ketimpangan struktural itu (Arief Budiman; 1996). Daalam konteks ini, jika penulis meminjam terminologi Bung Karno, dunia pertama yang merupakan negara-negara maju itu, disebut sebagai OLDEFO atau *The Old Emerging Forces* yang sudah mapan atau establish dan negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga yang disebut sebagai NEFO atau *The New Emerging Forces* (Soekarno: 2001). Sebagaimana layaknya sebuah teori, maka dapat disebut bahwa perintis teori ketergantungan, adalah; *Paul Baran* 1970-an, *Andre Gunder Frank* 1980-an dan kemudian oleh *Henrique Cardoso* 1979.

Para intelektual dari kelompok teori ketergantungan berpendapat, bahwa imperialisme masih hidup, dan bahkan pergerakannya semakin *canggih*, baik dalam pola-pola hubungannya, gerakan-gerakannya dan cara-cara yang lebih lunak; atau yang dalam istilah Bung Karno dikatakan sebagai *Neo-Kolonialisme* dan *Neo-Imperialisme* (NEKOLIM) dan yang kemudian sesudah dunia memasuki era pasca Perang Dingin serta runtuhnya Uni Soviet beserta sekutu-sekutunya sebagai dunia kedua, fenomena neo-imperialisme dan neo-kolonialisme itu dikonsepsikan secara intelektual oleh para pendukung liberalisme dan kapitalime menjadi *globalisasi* (Francis Fukuyama: 1996) dalam bukunya *The End of History*. Dalam buku ini Fukuyama berteori, bahwa akhir dari sejarah peradaban dunia adalah kemenangan kapitalisme dan liberalism di seluruh belahan dunia. Artinya, kapitalime dan liberalism akan berkuasa sepanjang masa selama peradaban manusia masih ada. Dalam konteks ini, negara-negara dunia pertama atau negara-negara bekas penjajah, tetap saja dapat mengontrol negara-negara bekas jajahannya, kendatipun negara-negara dunia ketiga secara politik telah mengalami proses dekolonisasi di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Dalam konsepsi globalisasi ini, David Held mengemukakan adanya tiga pandangan tentang perspektif pemahaman globalisasi (1999;30-35). Pertama, *hyperglobalist* yang mendefenisikan globalisasi sebagai sejarah baru peradaban manusia sejalan dengan memudarnya peran negara karena

tidak bisa menjadi satuan-satuan bisnis dalam dunia internasional. Pandangan ini melihat bahwa globalisasi ekonomi berakibat pada de-nasionalisasi ekonomi dengan terbentuknya net-working ekonomi transnasional, perdagangan dan keuangan. Pemerintahan nasional diposisikan tidak lebih dari “transmission belt” bagi capital global atau sebagai institusi perantara yang menyusup diantara kekuatan lokal, regional dan internasional yang bergerak dinamis; kedua, skeptical yang memandang bahwa globalisasi bukanlah fenomena baru, melainkan fenomena lama yang memiliki akar *socio-historikal* yang panjang dalam pergerakan dinamika politik internasional. Berbeda dengan paradigm hyperglobalist, maka dalam paradigm skeptical, kekuatan global sangat bergantung pada pemerintahan nasional untuk mengatur berbagai regulasi perekonomian dan lainnya guna melancarkan misi liberalisasi, ialah; keuntungan negara-negara besar atau negara-negara dunia pertama dan memarjinalkan negara-negara berkembang dalam kekuatan ekonomi dan kekuatan lainnya dari negara-negara besar itu, dan; ketiga, perspektif transformasionalis, yang menempatkan bahwa globalisasi adalah kekuatan utama di balik perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan politik yang menentukan format baru tatanan dunia. Dalam pandangan ini, globalisasi tidak membedakan lagi antara domestic dengan internasional karena hubungan-hubungan internal dan eksternal semakin kabur. Dalam konteks ini, kekuasaan negara dalam pengambilan keputusan harus disejajarkan dengan kekuasaan pemerintahan global, seperti; organisasi-organisasi internasional dan regional.

Teori ketergantungan memahami, bahwa keberhasilan pembangunan di negara-negara dunia ketiga, tidaklah semata-mata karena aspek internal suatu negara sebagaimana dipahami oleh teori modernisasi (Myron Weiner: 1978), dan melihat perkembangan pembangunan negara-negara berkembang hanya secara liner saja seperti “garis lurus”. Berbeda dengan teori modernisasi tersebut (J.W. School: 1991), maka teori ketergantungan mengkonstruksikan sebuah pemahaman, bahwa aspek-aspek eksternal tampak lebih banyak menentukan posisi dan kondisi pembangunan di negara-negara dunia ketiga (Arief Budiman: 1990). Bagi teori ketergantungan, struktur perkembangan dunia amat menentukan bagaimana proses pembangunan di negara-negara dunia ketiga dapat berlangsung (Arief Budiman; 1996). Keterbelakangan dan keterlambatan dunia ketiga, adalah akibat dari kondisi struktural dunia yang memang timpang antara negara-negara maju yang umumnya berada di belahan utara dunia dengan negara-negara berkembang yang umumnya berada di belahan selatan dunia atau di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Dalam kondisi ketimpangan struktural itu, maka terlihat hingga saat ini, pembangunan di kawasan negara-negara dunia ketiga hampir selalu erat berkaitan dengan kepentingan pihak barat. Hal ini setidaknya dapat dilihat

pada; *pertama*, negara-negara bekas jajahan dapat menyediakan sumber daya manusia yang murah dan sumber daya alam dengan mudah. Seringkali investasi negara-negara maju diuntungkan, karena negara-negara kurang maju dapat dan bersedia memberlakukan upah atau gaji yang kecil bagi tenaga kerjanya, sewa tanah yang murah dan bahan baku yang juga murah dan; *kedua*, negara-negara berkembang dapat menjadi pasar untuk hasil-hasil produksi negara-negara maju, sebaliknya produksi untuk eksport dari negara-negara berkembang seringkali ditentukan oleh negara-negara maju dengan ketimpangan pada nilai tukar produk bahan mentah atau setengah jadi negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Hal itu semua dapat kita lihat pada kasus-kasus membungunya hutang negara-negara dunia ketiga, seperti terjadi, antara lain; di Yunani, Brazilia, Argentina dan lain-lainnya. Mereka membantu negara-negara berkembang, tetapi dengan syarat-syarat tertentu, termasuk dengan “*memaksa*” negara-negara berkembang membuat aturan atau regulasi-regulasi tertentu atau menetapkan kebijakan tertentu yang pasti menguntungkan negara-negara maju. Salah satu contohnya di Indonesia, adalah; keharusan adanya perubahan sistem kerja BULOG, yang semula wajib membeli produk petani untuk menjaga stabilitas harga, namun pasca Letter of Intent IMF 1998, hal itu sudah tidak dibenarkan lagi, dan menyerahkannya pada mekanisme pasar. Akibatnya, terjadi kehancuran pada produk-produk pangan dalam negeri dan juga, rusaknya kualitas produk pangan akibat ketidakjelasan tentang tanggung jawab pengelolaan irigasi pertanian pasca politik otonomi daerah atau pasca Reformasi 1998. Kesulitan penguasaan pasar dan rendahnya kualitas produksi petani, mengakibatkan pemerintah mengambil “jalan pintas” untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan di dalam negeri dengan mengimport bahan-bahan pangan untuk konsumsi dalam neger, termasuk daging sapi. Kondisi ini dapat terjadi, atas “*persekongkolan*” antara modal asing, pemerintah nasional dan borjuasi nasional, sehingga terjadilah apa yang disebut sebagai “*Pemburu Rente*” yang menjangkiti birokrasi, parlemen dan borjuasi nasional.

Selanjutnya, teori ketergantungan dikritik oleh para penentangannya, bahwa paradigma ini terlalu meyalahkan kapitalisme atau faktor-faktor eksternal dari negara-negara berkembang atas keterlambatannya dalam pembangunan negara (Adi Sasono; 1995). Dalam pandangan teori ketergantungan, faktor-faktor internal tidak terlalu memegang peran penting di dalam percepatan pembangunan negara-negara dunia ketiga. Sementara itu, Cardoso dan Faletto, menyatakan bahwa kondisi internal negara-negara dunia ketiga memegang peranan penting dalam percepatan pembangunan negara-negara berkembang guna mengejar ketertinggalannya. Menurut Cardoso dan Faletto, hal itu bergantung pada sikap, response dan reaksi elit-

elit strategis di negara-negara berkembang, khususnya elit strategis (Suzanne Keller; 1995) yang memegang tampuk kekuasaan negara.

Dalam pada itu, sebagaimana dikatakan oleh O'Donnell dan Peter Evans, bahwa terjadi persekutuan tiga unsur yang dapat menjadi faktor penentu tentang bagaimana pembangunan di negara-negara berkembang, yakni; modal asing, pemerintah di dunia ketiga dan borjuasi lokal (Arief Budiman, 1977 : 113-114) yang terminology Suzanne Keller disebut sebagai elit strategis. Dalam hemat penulis, ketiga unsur ini telah menjadi suatu "formasi" elit strategis di negeri ini, dan telah terbentuk serta terjadi "persekongkolannya" sejak jaman kapitalisme dan imperialisme Belanda di negeri ini, baik dengan sistem penjajahan tidak langsung maupun dengan sistem penjajahan langsung sehingga terbentuk negara Hindia Belanda. Dalam pada itu Hamza Alavi seorang teoritis *Negara Pasca-Kolonial (Pasca Colonial-State)* menegaskan, bahwa dalam ketimpangan structural tata dunia, sesungguhnya negara-negara berkembang pasca proses de-kolonisasi sesudah Perang Dunia Ke II, merupakan suatu "Reproduksi" dari negara-negara terjajah di dalam hubungannya dengan negara-negara bekas penjajah atau negara-negara dunia pertama.

Di era sekarang pasca Reformasi 1998, ketiga faktor itu tetap menjadi faktor penentu. Menurut hemat penulis, bagaima perimbangan kekuatan diantara ketiga faktor itu (modal asing; pemerintah nasional dan borjuasi lokal), adalah amat bergantung pada "karakter" rezim pemerintah yang berkuasa di negara-negara dunia ketiga masing-masing. Dengan begitu, untuk konteks Indonesia, kita dapat membandingkannya di masing-masing era Kepresidenan RI dari tujuh Presiden di negeri ini.

Lebih lanjut, neo-kapitalisme dan neo-imperialisme yang pasca berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur tahun 1990, yang kemudian secara akademis dihaluskan dan dikonstruksikan dengan *konsep globalisasi*, terus makin menjadi kekuatan dari jiwa kapitalisme dan imperialisme itu. Bahkan sistem imperialisme yang kemudian "terstruktur" dalam bentuk konsepsi globalisasi itu, berlindung di balik konsep-konsep seperti privatisasi, perdagangan bebas, penanaman modal asing, beroperasinya *multy national corporation*, desentralisasi ijin-ijin pengelolaan sumber daya alam; atau bahkan melalui penguasaan secara halus dengan "mengkondisikan" berbagai pembentukan peraturan perundang-undangan di negara-negara dunia ketiga pada tingkat optimalisasi tertentu sesuai dengan kepentingan negara maju. Ini semua memungkinkan penguasaan asing terhadap sumber daya alam secara langsung melalui para kepala daerah di negeri ini seperti juga pernah terjadi di zaman negara Hindia Belanda, yakni; melalui para bupati/ penguasa-penguasa lokal setempat. Perbedaannya hanyalah pada bentuk komiditinya dan korporasinya. Jika dulu hanya ada satu VOC atau ada hanya satu/ dua perusahaan minyak AS, maka

sekarang banyak “VOC”. Ofensif kapitalisme dan imperialisme sekarang, bukan hanya memalui penguasaan ekonomi dan budaya, akan tetapi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan pihak asing.

Dalam pandangan penulis, perspektif pandangan globalisasi yang disebut *skeptical* dan *transformasionalis* dapat “memotret” fenomena makin menguatnya kekuatan-kekuatan imperialis itu terhadap negara-negara berkembang dengan cara yang makin “*sophisticated*”. Kekuatan negara-negara maju dan instrumen-instrumen transnasionalnya ini untuk dapat menguasai negara-negara berkembang, bergantung pada response, sikap dan posisi pemerintahan nasional di negara-negara berkembang dengan sekutunya di dalam negeri, ialah; borjuasi lokal. Struktur dan anatomi demikian, tidak lain merupakan penerusan dari keberadaan negara-negara berkembang sebagai negara pasca-colonial. Misi, visi, karakter, kadar legitimasi dan sumber basis legitimasi rezim pemerintahan nasional negara-negara berkembang, akan menentukan posisi, sikap, responsi dan kebijakan pemerintah nasional terhadap modal asing sebagai instrument kekuatan transnasional apakah pemerintah akan bersikap pro-populis ataukah bersikap pro neo-liberalis yang kemudian acapkali menjadi jiwa dan RUH daripada kebijakan-kebijakan yang diproduksi negara.

Dalam pada itu Abramo Fimo Kenneth Organsy dalam bukunya *Tahap-Tahap Perkembangan Politik* menjelaskan teori peralihan kekuasaan politik melalui penjelasannya tentang tahap-tahap perkembangan politik di negara-negara bangsa, baik di negara-negara tua maupun di negara-negara baru, atau aoa yang disebut sebagai *The Stage of Political Development* (1985; 18-244) yang terdiri atas empat tahap, yaitu; politik unifikasi primitif/proses integrasi nasional; politik industrialisasi; politik kesejahteraan nasional dan; politik kelimpahan. Tahap politik unifikasi primitif menjelaskan bagaimana sebuah komunitas tumbuh secara bertahap menjadi sebuah kesatuan nasional negara-negara bangsa melalui pertumbuhan politik-dinasti dan adanya kolonialisme dan imperialisme, baik di kalangan bangsa-bangsa tua dan negara-negara bangsa yang baru akibat proses de-kolonisasi di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin. Tahap industrialisasi menjelaskan tentang bagaimana konfigurasi peranan pemerintah di negara-negara lama dan di negara-negara baru, baik melalui jalan politik industrialisasi borjuis; jalan politik Stalinis dan jalan politik Sinkretik. Tahap politik kesejahteraan sosial, dapat dilakukan melalui jalan demokrasi massa liberal, jalan negara Nazi, jalan komunisme dan jalan politik etatisme oleh negara. Politik kelimpahan menjelaskan sebuah masa-masa peralihan, perubahan-perubahan struktur kekuasaan, perubahan fungsi-fungsi pemerintahan, perubahan bentuk pemerintahan; dan sampai kepada

berakhirnya negara-bangsa akibat dari proses-proses pada tahap-tahap perkembangan politik sebelumnya.

Berdasarkan perspektif teori dependencia dari Paul Baran, Landsberg Henderiq Cardoso, Ferdinan De Soto, Sritua Arif dan Adi Sasono dan, baik teori dependencia klasik maupun teori dependencia modern; teori negara *pasca-colonia* dari Hamza Alavi; teori peralihan kekuasaan dalam tahap-tahap perkembangan politik dari A.F.K Organsky, maka Penulis bermaksud “memotret” realitas dan paosisi perkembangan terkini dari sebuah negara-bangsa, yaitu; negara kesatuan RI Pasca Reformasi 1998 tentang hakikat realitas kondisi kemerdekaan bangsa dan negara RI yang pasca Reformasi menjadi negara ultra-liberal dalam konsepsi dependencia dan konsepsi tahap-tahap perkembangan politik menurut A. F. K. Organsky. Kemudian, Penulis akan mengkaji bagaimana momentum untuk mengembalikan posisi dan karakter rezim atas dasat jatidiri dan karakter bangsa yang dibentuk para pendiri bangsa dan negara RI dan yang teruji di dalam Revolusi Bangsa Indonesia Agustus 1945 serta Perang kemerdekaan RI tahun 1945-1949. Kemudian daripada itu juga, Penulis bermaksud mengkaji posisi Nawacita Kepresidenan Jokowi-Kalla melalui jiwa dan semangat Tri-Sakti Bung Karno sebagai jalan rekonsolidasi negara dan bangsa Indonesia untuk kembali kepada REL Pancasila sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, tentu saja dalam perspektif dependencia, perpsktif negara pasca-colonial dan tahap-tahap perkembangan politik.

D. Realitas Kondisi Indonesia Pasca Reformasi 1998: Uregensi Jalan Tri-Sakti bung Karno untuk Rekonsolidasi Implementasi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Tri Sakti ajaran Bung Karno, yakni; berdaulat dalam politik; berdikari dalam ekonomi; dan berkepribadian dalam kebudayaan, tampaknya sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini menghadapi ketimpangan structural dan mengkonsolidasikan elit nasional untuk mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia. Dari untaian drama historis bangsa Indonesia dapat terlihat, bahwa sejak Tragedi Nasional tahun 1965, maka secara massif, reepresif dan radikal telah terjadi penghancuran terhadap seluruh pikiran-pikiran kiri, kelompok-kelompok kiri dan gerakan-gerakan kiri atau yang dapat diposisikan sebaga kiri. Kekuatan nasionalis radikal yang direpresentasikan dengan PKI dan PNI (*PNI ASU*) (J. Eliseo Rocamora: 1991; dan Olle Tornquist; 2014), memang benar-benar dihancurkan hingga ke akar-akarnya, bahkan meskipun mereka tidak ada sangkut-pautnya dengan PKI sekalipun. Lebih dari itu, “*stigmatisasi*” atas lebel “Kiri” dan PKI dijadikan “alat” untuk menyingkirkan lawan-lawan politik penguasa. Sejak itu dan dengan tampilnya rezim Orde Baru ke dalam tampuk kekuasaan di Indonesia pada tahun 1966, maka segeralah dimulai proses liberalisasi

ekonomi sebagaimana terlihat bahwa UU yang pertama kali disahkan oleh Presiden Soeharto bersama DPR-GR yang sudah direshuffle dari anasir-anasir kiri, adalah disahkannya UU PMA No. 1 tahun 1967 yang resmi mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 1967.

Sementara itu Presiden Soekarno telah dicabut kekuasaannya pada tanggal 12 Maret 1967 dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/ MPRS/ 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Soekarno. Sejak tanggal itu pula, sesudah memalui berbagai proses politik yang “*cukup rumit*”, Soeharto menjadi Pejabat Sementara Presiden RI, yang kemudian menjadi Presiden defenitif yang dipilih dan ditetapkan oleh MPRS pada tanggal 27 Maret 1968. Sebelumnya, Soeharto telah menjadi Ketua Presidium Kabinet RI dari tanggal 25 Juli 1966 – 17 Oktober 1967 (Wikipedia; <https://id.m.wikipedia.org>). Hal ini mengisyaratkan, bahwa salah satu langkah strategis Soeharto terhadap kekuatan modal asing adalah menetapkan PMA tersebut. Inilah yang memungkinkan Freeport segera dengan mudah masuk ke RI dengan beroleh keuntungan yang luar biasa hingga saat ini. Politik liberalisasi dan pembukaan modal asing terus berlangsung untuk menjalankan konsepsi dan strategi pembangunan ekonomi Orde Baru dengan tesis utama rezim Orde Baru, adalah, bahwa stabilitas politik, merupakan prasyarat bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi, sekalipun dengan politik liberalisasi ekonomi dan politik pintu terbuka atas masuknya modal asing, yang beresiko ataskemandirian bangsa.

Di lain sisi, berbeda dengan pendahulunya, yakni; Bung Karno yang justru terus melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing, khususnya milik Belanda, secara lebih cepat terutamanya di tahun 1959-1965. Bahkan Soekarno, berhasil menetapkan UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA 1960) yang bersifat sosialis. Sejak UU PMA tahun 1967 itulah, segera dimulai liberalisasi dalam bidang ekonomi. Tetapi dalam bidang politik, rezim Soeharto justru membangun sistem politik yang sesungguhnya adalah Sistem Demokrasi Terpimpin Konstitusional (Eep Saefullah Fatah: 1996). Sistem ini, sesungguhnya merupakan penerusan dari Sistem Politik Demokrasi Terpimpin versi Bung Karno (Roy BB. Janis: 2006), yang kemudian “dimodifikasi” oleh Soeharto menjadikan sistem politik Orde Baru yang bersifat monolitik dan otoriter. Namun di dalam bidang ekonomi, Soeharto menjadi menjalankam “*politik pintu terbuka lebar*” terhadap modal asing, utang luar negeri, dan kemudahan-kemudahan bagi investasi asing di Indonesia, baik dari AS, Jepang dan negara-negara barat pada umumnya. Dengan demikian, tetap saja terjadi suatu persekutuan tiga pihak sebagaimana dikatakan O’Donnell dan Peter Evans, ialah; Modal Asing; Pemerintahan Nasional; dan Borjuasi Lokal yang memudahkan penguasaan asing atas ekonomi Indonesia. Hal itu sangat terlihat,

terutamanya dalam eksploitasi dan eksplorasi berbagai sumber daya alam, seperti; minyak bumi, gas alam, batubara, nikel, emas dan lain-lainnya.

Dalam kondisi itu, rezim Orde Baru sangat menikmati stabilitas politik jangka panjang, yang menurut Arbi Sanit (1981: 1-15) ditentukan oleh tiga aspek, ialah; Pembangunan Ekonomi; Dinamika Partisipasi Politik; dan Pelembagaan Politik. Ketiga aspek inilah, yang menjadi faktor kunci dalam pengelolaan stabilitas politik di masa Orde Baru dengan sistem politik yang monolitik dan otoriter guna mengimplementasikan tesis utama pemerintah Orde Baru, bahwa stabilitas politik merupakan prasyarat pembangunan ekonomi. Karakter rezim Orde Baru, dalam bidang ekonomi sangat pro PMA dan dalam bidang politik bersifat tertutup dan berkarakter *konservatif*. Sebagaimana diketahui situasi ini berlangsung hingga tahun 1998, saat terjadi Reformasi 1998, yang menyebabkan kejatuhan Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan RI.

Pada fase inilah, terjadi sebuah Reformasi yang ternyata minim visi, sebab fokus utama kaum reformis hanya pada tersingkirnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan. Bahkan liberalisasi ekonomi, politik, hukum dan budaya berjalan semakin menjadi-jadi pasca Reformasi 1998 hingga puncaknya terjadi di zaman Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Hal mana dapat kita lihat dari berbagai kebijakan dan peraturan perundangan-undangan di bidang pengelolaan sumberdaya alam; Perbankan; PMA; Perkebunan, Pertanian; berbagai import bahan pangan; pengelolaan BUMN dan lain sebagainya. Mempersepsikan kondisi demikian, Soekarwo Gubernur Jawa Timur selaku Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI dalam pidatonya saat pengukuhan Pengurus Pusat Persatuan Alumni GMNI Hasil Kongres II, di Jakarta, pada tanggal 1 Desember 2010 berjudul “Manifesto Politik Persatuan Alumni GMNI” bahwa:

“Jika dulu di awal RI kita mengucapkan Sekali Merdeka, Tetap Merdeka!!!, maka sekarang kondisi kita menjadi; Sekali Merdeka, Merdeka Sekal!!!. Itulah suasana pasca Reformasi 1998”.

Selanjutnya menurut hemat penulis, pasca penghancuran pikiran-pikiran kiri, kelompok-kelompok kiri dan gerakan kiri atau apapapun yang dianggap kiri dan PKI, telah dengan sempurna dihancurkan Orde Baru, dan kemudian membentuk dan membangun sistem politik konservatif, tetapi dalam lapangan ekonomi dan budaya dilakukan liberalisasi yang luar biasa cepatnya. Ketika secara politik, rezim Orde Baru mengalami kebangkrutan politik akibat Reformasi 1998, maka kecepatan liberalisasi itu bertambah kencang, baik di bidang politik, dan lebih kencang lagi di bidang ekonomi serta kemudian di bidang kebudayaan, bahkan dalam pengelolaan pendidikan nasional pun, tak lepas dari liberalisasi itu. Oleh sebab itu dalam pandangan penulis, Reformasi 1998 itu, adalah suatu kemenangan kelompok kanan-liberal yang merupakan bagian struktural dan jaringan kekuatan modal

asing barat di Indonesia dan kekuatan politik asing atas nama proyek demokrasi, keterbukaan, daulat rakyat, desentralisasi, otonomi daerah dan globalisasi dunia.

Kelompok-kelompok nasionalis-radikal yang merupakan musuh utama kapitalisme dan modal asing, telah dihancurkan rezim Orde Baru. Kemudian rezim Orde Baru, secara politik mnejadi rezim dengan karakter konservatif. Secara anatomis, struktur kekuasaan rezim Orde Baru, merupakan persekutuan "*segi-tiga kutub kekuatan politik*", yaitu; Presiden Soeharto; ABRI; dan GOLKAR. Ketika keseimbangan ketiga pihak ini, lepas kendali dari kekuasaan Presiden Soeharto, dan dengan bekerjanya faktor eksternal dari luar rezim, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, maka sistem politik Orde Baru mengalami kebangkrutan. Secara anatomi kelompok, dapat dikatakan inilah persekutuan kaum kanan-konservatif, yang memperlambat proses perubahan politik ke arah demokrasi yang lebih universal. Dari perspektif teori depedensia baru, maka rezim Orde Baru pada hakikatnya adalah suatu persekutuan politik-ekonomi antara korporasi multinasional-trnasnasional dengan negara birokratis-teknokratis-militeristik dan borjuasi nasional (Suwarsono dan Alvin Y. SO; 1991 :142-149).

Namun demikian, kelompok-kelompok kanan-liberal terus mengadakan konsolidasi bersama dengan kelompok-kelompok oposisi dan massa mahasiswa, sebagai "pelancar" perubahan politik. Kelompok kanan-liberal, bahkan juga bekerja sama dengan kelompok-kelompok kanan-fundamentalis guna menumbangkan rezim Orde Baru. Barat "berterimakasih" kepada rezim Orde Baru, karena rezim Orde Baru telah berhasil dengan nyaris sempurna menyingkirkan sampai ke akar-akarnya pemikiran, ideologi dan gerakan kaum nasionalis-radikal, bahkan kaum nasionalis moderat sekalipun. Kemudian sekali lagi barat, berterimakasih kepada rezim transisi demokrasi di Indonesia pimpinan Habibie, atas keberhasilannya bersama kelompok kanan-lberal menyingkirkan pemikiran dan gerakan kaum kanan-konservatif atas nama proyek demokratisasi dan HAM barat melalui "persekutuan" dengan kaum kanan-liberal dan kelompok kanan-fundamentalis yang mengulirkan Reformasi 1998.

Secara sistem, tatanan dan struktural politik, maka sistem politik Orde Baru baru bersifat tertutup dan monolitik. Pada hakikatnya sistem politik Orde Baru adalah suatu sistem politik Demokrasi Terpimpin Konstitusional (Eep Saefullah Fatah: 1994, : 187-203) yang dalam pandangan Penulis merupakan modifikasi; modernisasi ke tesis utama Orde Baru, bahwa "*stabilitas politik adalah prasyarat pertumbuhan ekonomi*"; kemudian politik de-parpolisasi; birokratisasi; militerisasi; *floating-mass* (massa mengambang); de-ideologisasi atas sistem politik Demokrasi Terpimpin 1959-1965 menjadi sistem politik Orde Baru yang berlangsung dari 1966-1998. Sementara itu, dalam pembangunan ekonomi dan sosial, Orde Baru

menjalankan politik “pintu-terbuka lebar” atas modal asing dan menempuh jalan liberalisasi di bidang ekonomi, politik anggaran berimbang; dan bergantung pada utang luar negeri untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tetapi ternyata fundamental ekonomi kita di masa Orde Baru tidaklah kuat, sebagaimana terbukti saat menghadapi krisis moneter dalam tahun 1996-1998., yang kemudian menjadi pintu terjadinya Reformasi 1998. Reformasi 1998, menghasilkan liberalisasi dengan neo-liberal dan bahkan neo-ultra liberal, baik di bidang politik, ekonomi, hukum dan budaya serta tersingkirnya kelompok kanan-konservatif dan kemenangan kaum kanan-liberal, serta kembalinya kaum kanan-fundamentalis yang di masa Orde Baru menjadi target penenggelaman walau dalam di era Reformasi kaum kanan-fundamental mendapat ruang politik atas nama demokrasi dan HAM, namun ia masih dalam “kontrol” kaum kanan-liberal yang memang amat menguasai berbagai sumber daya alam, sumber daya ekonomi dan sumber daya keuangan. Kondisi demikian inilah yang memang dikehendaki kekuatan barat dan modal asing, ialah; tersingkirnya kaum nasionalis-radikal; kaum nasionalis-moderat; kaum kanan-konservatif yang dianggap pronasionalistik; dan tersingkirnya kaum kanan fundamentalis. Dengan demikian, barat, modal asing dan kekuatan trans-nasional mendapat sekutu utamanya di dalam RI, ialah; kaum kanan-liberal yang bisa ada di partai-politik (baik partai agama maupun partai nasionalis, ada di parlemen, ada di daerah, ada di kabinet dan bahkan bisa ada juga di dalam lingkaran Istana, siapapun Presidennya.

Kalau saja, Presiden Soeharto melakukan suatu Reformasi Terpimpin pada paling lambat tahun 1993, atau setidaknya Presiden Soeharto memilih Wakil Presiden 1998-2002 dari figur yang kuat menghadapi “badai ultra-liberal”, maka sangat bisa jadi Reformasi 1998 yang sebagaimana telah terjadi itu dengan segala akibatnya, tidak akan terjadi. Artinya kaum *kanan-liberal* belum tentu berkuasa sebagaimana adanya sekarang di berbagai lini strategis, dan tak akan terjadi “*banjir bandang*” arus ultra-liberal ke dalam politik, ekonomi, sosial dan hukum di RI adalah seperti yang terjadi pada kepemimpinan Mahatir Mohamad di Malaysia atau juga pada kepemimpinan Lee Kwan Yu di Singapura suatu Reformasi yang gradual dan terpimpin. Reformasi 1998, oleh karena wataknya yang “ultra-liberalis” itu, maka menyerahkan segala proses politik, ekonomi, sosial dan hukum kepada tuannya yang bernama “pasar-bebas” sebagai pemimpinya. Kondisi ini mirip dengan Rusia di masa kepemimpinan Gorbachev dan Borist Yeltsin, yang secara territorial menyebabkan lepasnya wilayah-wilayah bekas Uni Soviet itu menjadi negara merdeka; dan di RI lepasnya Timor-Timur, lalu adanya wacana dan kemungkinan referendum yang didorong pihak-pihak tertentu di dalam neger RI, baik untuk Papua maupun Aceh dengan faktor risiko seperti terjadi di Timor Timur tahun 1998.

Dalam konteks ini, kita harus belajar dari perubahan yang terjadi di Uni Soviet tahun-tahun 1990-an, terpecah-pecah dan bahkan bubar, tanpa satu buah bedilpun dari kekuatan luar termasuk dari AS terhadap Uni Soviet (Wiratmo Soekito, Ed, Dwi Susanto dan Zainuddin Djafar : 1-17), yaitu; hanya dengan satu ofensif sistematis dari jaringan “ultra kanan-liberal” ke negeri itu yang menimbulkan ketidakpastian luar biasa di Rusia (Simon Saragih; 2008 : 35-45; dan Fadli Zon; 2002 : 147-181). Kendati demikian kepemimpinan Presiden Vladimir Putin dengan PM Dimitry Medvedev, yang bahkan sesudah Presiden Putin memerintah dua kali berturut karena terhalang aturan Presiden dua Periode, maka seorang Vladimir Putin rela menjadi PM dan Presidennya adalah Dimitry Medvedev, dan sesudah itu; kembali Vladimir Putin mmenjadi Presiden lagi yang terpilih secara demokratis hingga saat tulisan ini dibuat dengan PM Dimitry Medvedev, berhasil membendung kekuatan ultra kanan-liberal itu, bahkan mengembalikan kejayaan Rusia di masa lalu, bahkan lebih dari itu, Rusia bangkit dengan gagahnya seperti Uni Soviet dahulu (Andi Raffael Saputra; 2014 : 110-145), dan bahkan Rusia lama, menjadi bangsa “pemain” di pertarungan global.

Dengan begitu, Reformasi 1998 ini, adalah sebuah “patahan sejarah” RI, yang pada hakikatnya melakukan pembelokan posisi di Indonesia di semua lini bergerak ke kanan, ke arah liberalisasi, individualisasi dan “pasar bebas” di semua lini, sehingga rezim baru apapun tak kuasa menghadapi anasir kekuatan modal asing dan transnasional yang sudah makin kuat di RI, dan yang bergerak secara massif dan eskalatif. Sebab untuk mengeruk sumber daya alam dari Indonesia, kekuatan modal asing memerlukan sekutu politik dan ekonomi di dalam negeri, ialah; kaum kanan-liberal di Indonesia. Pemimpin Indonesia, secara demikian terjebak dalam kepungan kekuatan kanan-liberal di Indonesia yang merupakan sekutu modal asing dan kekuatan transnasional.

Dengan demikian, kaum kanan-liberal menjadi pemenang dan penikmat Reformasi 1998 atas nama demokrasi, HAM dan liberalisasi ekonomi, politik dan sosial tanpa mempedulikan nasib bangsa dan generasi keturunan ke depan. Pemikiran jangka pendek lebih diutamakan ketimbang berpikir jangka panjang. Akibatnya “*Negara Ultra-Liberal*” RI lebih banyak memproduksi “*kultur-politisi*” bahkan “*kultur-premen*” berkerah putih. Kita sangat miskin “*kultur-negarawan*”, tetapi inflasi pemimpin berkarakter “*kultur-politisi advonturir*”, yang hanya berpikir “*aku*”, “*kami*”, “*keluarga*”, dan “*golongan-ku*”, tanpa memperdulikan masa depan bangsa dan negara RI serta generasi masa depan Indonesia. Berpikir, berjiwa, berucap dan bertindak “*pragmatism-oriented*” menjadi orientasi dalam berbuat dan bertindak, tanpa cita dan visi yang kuat, semuanya serba jangka pendek semata dan tidak mempunyai karakter dan jatidiri..

Bahkan setelah Reformasi 1998 terjadi, maka kaum kanan-liberal yang berwatak borjuis itu, segera meninggalkan massa rakyat, dan kemudian kembali melakukan persekutuan dengan kekuatan modal asing transnasional modal asing; kekuatan asing; dan borjuasi lokal. Kelompok kanan-fundamentalis, dapat dijinakkan oleh kaum kanan-liberal dan hanya menjadi faktor pengganngu yang tidak signifikan bagi kekuatan kanan-liberal. Menurut hemat penulis, dari sisi peta pengelompokan, pada dasarnya Reformasi 1998 merupakan *aliansi-strategis* antara kekuatan asing, kaum kanan-liberal yang bersekutu dengan mahasiswa dan rakyat melawan kelompok kanan-konservatif. Ketika Reformasi 1998 berhasil melengserkan Presiden Soeharto, maka kaum kanan-liberal segera meninggalkan aliansi populisnya, yakni; mahasiswa dan massa rakyat, dan kemudian kembali kepada “watak aslinya” yang bersifat kapitalistik dan liberalistik, serta segera bersekutu dengan kaum kanan-liberal asing dan dengan borjuasi lokal di Indonesia.

Tak ubahnya seperti golongan borjuis yang bersekutu dengan golongan proletar dalam Revolusi Perancis 1789 melawan golongan ningrat, golongan feodal dan pemuka agama (katholik), dan sesudah golongan-golongan konservatif-reaksioner itu tersingkir, maka segera golongan borjuis itu meninggalkan sekutu proletarnya. Sesudah itu golongan borjuis dengan jiwa individualisti-kapitalistiknya dan politik-liberal segera berjuang berjuang di parlemen menetapkan berbagai UU yang menguntungkan kaum biorjuis tanpa memperdulikan posisi rakyat. Demikianpun, kaum kanan-liberal dalam Reformasi Indonesia 1998, segera bekerja menetapkan berbagai regulasi yang bersifat liberalitik dan menjalankan politik pintu terbuka secara luar biasa atas modal asing yang mengakibatkan penguasaan berbagai sumber daya alam di Indonesia oleh kekuatan asing berupa korporasi-korporasi makin menjadi. Hal itu dapat dilihat berbagai kebijakan dan UU di bidang pengelolaan sumber daya alam, antara lain; Minerba, Gas Alam, Perkebunan, PMA, Perbankan, Privatisasi BUMN, Perikanan dan lain-lainnya. Kaum kanan-liberal nasional, bisa berada di partai politik, parlemen, birokrasi dan pemerintahan, juga pada pemerintahan lokal.

Adapun pengelompokan kelompok-kelompok dengan pengelompokan karakter ideologis, pemikiran dan gerakan politik di Indonesia pasca Reformasi 1998, maka dapat dikelompokan setidaknya ke dalam beberapa “*species*” pemikiran, karakter ideologi dan gerakannya, yakni; nasionalis-radikal, nasionalis-moderat, kanan-konsevatif, kanan-liberal dan kanan-fundamentalis. Kelompok-kelompok dengan posisi ideologi kanan-liberal yang merupakan pemenang sesungguhnya dari Reformasi 1998 dan berwatak borjuasi, bersekutu secara taktis dengan kaum kanan-fundamentalis dan kelompok-kelompok populis gerakan rakyat untuk menggeser dominasi kanan-konservatif. Di lain sisi, kelompok dengan ideologi nasionalis-radikal

telah dihancurkan oleh kelompok kanan-konsevatif yang mendominasi format sistem politik Orde Baru. Sebagai pemenang Reformasi 1998, maka kelompok kanan-liberal sangat mewarnai kebijakan-kebijakan yang dihasilkan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hukum (Lihat, Elli Ruslina; 2013) dalam perpektif skeptical dan tranformasionalis teori globalisasi serta adanya adanya sekutu kekuatan-kekuatan transnasional itu dalam pemerintahan yang berkuasa dimana kaum-kanan liberal memegang posisi-posisi kunci yang bersekutu dengan borjuasi nasional.

Dengan kondisi demikian, secara konseptual negara RI pasca Reformasi 1998, justru menjadi “Replika” dari negara Hindia Belanda atau bahkan “Reinkarnasi” yang lebih sempurna “formasi-sosialnya” dan “proses reproduksi” negara Hindia Belanda ke dalam RI Pasca Reformasi 1998 sebagai negara pasca-colonial konvensional menjadi menjadi negara pasca-colonial yang sistem koloninya semakin modern di dalam tubuh negara RI. Penguasaan kaum kanan liberal atas Indonesia dilakukan tidak perlu dengan satu bedil-pun, bahkan tidak perlu terlihat kasat mata. Mereka kuasai RI, melalui kolaborasi dalam penyiapan berabagai regulasi, sehingga tanpa disadari banyak berbagai regulasi itu yang tidak memiliki Jiwa atau RUH Pancasila, melainkan RUH nya dan jiwa-nya daripada *neo-liberalisme*. Dengan begitu, sekali lagi Reformasi 1998 adalah suatu “*patahan*” sejarah atas kemerdekaan Indonesia yang bergeser dan bergerak kencang ke arah kanan dalam meastream *neo-leberalisme*.

Selain penguasaan melalui okupasi (pendudukan) secara canggih dalam banyak bidang, khususnya di bidang pengelolaan sumber daya alam melalui pembentukan berbagai regulasi di bidang politik dan ekonomi yang melindungi dan memfasilitasi atau berjiwa melindungi dan menguntungkan kaum kana-liberal, maka sudah waktunya kita saat ini mewaspadai kemungkinan adanya skenario pendis-integrasian wilayah teritorial RI, baik di ujung barat (Aceh) maupun di ujung timur (Papua) dan di bagian lainnya dari wilayah negara kesatuan RI. Kenyataan, bahwa terus terjadi penambahan jumlah personil mariner AS di Darwin Australia, tentulah bukan tanpa agenda penting yang hanya berjarak 820 Km jarak terbang antara Darwin, Australia dengan Timika, Papua – RI..

Sebelum tahun 2011 jumlah mariner AS di Darwin, Australia hanya 250 personil. Namun dengan alasan kemanusiaan, pada tanggal 17 November 2011 Presiden AS Barack Obama mengumumkan rencana kehadiran Pangkalan Militer di Darwin saat ke Australia. Obama dan Gillard mengumumkan, bahwa AS akan menambah kekuatan mariner-nya di Darwin, dari 250 menjadi 2.500 personil pada tahun 2012. Namun tiada hujan dan tiada badai, pada tahun 2013 AS kembali menambah jumlah personil mariner-nya di Darwin sebanyak 20.000 personil, sehingga pada akhir 2014 sudah terpat 22.250 personil mariner AS di Darwin yang setara dengan 9

Divisi ([https// / Jakarta45.wordpress.com](https://Jakarta45.wordpress.com)>*militer*), tentu atas izin Australia karena kesamaan kepentingan terhadap kawasan Asia Tenggara, Pasifik dan Indonesia, khususnya skenario terhadap Papua. Penambahan jumlah personil dalam situasi politik sekarang, tentu tidak mungkin tanpa agenda dan skenario serta target-target tertentu atas posisi Indonesia sebagai yang terdekat dari Darwin, Australia, baik bagi AS maupun Australia.

Dengan latar belakang itu semua, dari perspektif Dependencia (Dependencia Klasik atau Dependencia Baru) dan juga teori negara pasca-colonial, maka masa kepresidenan Joko Widodo bersama Jusuf Kalla, adalah merupakan suatu momentum yang tepat untuk mengembalikan haluan Indonesia yang neo-liberalistik itu kepada jalan Pancasila sebagaimana digagas oleh para pendiri bangsa dan negara Indonesia. Selama ini, menurut hemat penulis haluan perjalanan RI sejak tahun 1967 telah makin mengarah ke “kanan” dalam jalan liberal yang terbukti selalu menciptakan ketimpangan di dalam negeri, baik ketimpangan struktural antar daerah, antar golongan, antar wilayah, antara desa dengan kota dan makin kuatnya penguasaan asing atas berbagai sumber daya alam di Indonesia, dan lebih dari itu juga menciptakan krisis nasional. Jadi, momentum ini tidak boleh disia-siakan, jika kita berpikir jangka panjang untuk tetap menjaga eksistensi negara kesatuan RI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945. Jika tidak, maka negeri ini akan masuk dalam skenario *neo-liberalisme* atau bahkan *ultra-liberalisme*, baik dibidang ekonomi, politik, budaya dan hukum, dan bahkan adanya potensi skenario Balkanisasi di atas wilayah teritorial RI.

Fase ini merupakan sebuah fase yang tepat atau sebuah “*momentum*” untuk memutar kembali haluan perjalanan RI dari arah yang sudah terlalu “*ke kanan*”, agar kembali “*ke tengah*” sesuai dengan ideologi bangsa dan negara, yakni; Pancasila. Dalam terminologi Bung Karno, menurut pendapat penulis sekarang saatnyalah yang tepat pemimpin Indonesia untuk melakukan “*Politik Banting Strir*” “*memutar*” haluan perjalanan bangsa, kembali kepada **REL** ideologi bangsa dan negara, yakni; Pancasila sebagaimana digagas para pendiri bangsa. Menurut pendapat Alfian (1985: 25), bahwa suatu ideologi bangsa akan dapat bertahan menghadapi tantangan bangsa, baik eksternal maupun internal, ialah jika ideologi itu memiliki tiga dimensi dinamis yang berkerja sekaligus, yaitu; dimensi idealisme; dimensi pembaharuan dan; dimensi fleksibilitas. Ideologi inilah wajib menjadi “**RUH**” dari kebijakan-kebijakan negara di bidang politik, ekonomi, budaya dan hukum. Karena itu, Ajaran Tri-Sakti Bung Karno, dalam konteks ini adalah suatu peta jalan menuju pengimplementasian kembali ideologi bangsa dan negara RI menjadi suatu haluan perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Menurut penulis, periode kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla ini, pada gilirannya diharapkan merupakan suatu rekonsolidasi total dalam suatu

Rediscovery of Our Revolution atau suatu “penemuan kembali” atas revolusi Indonesia dengan jiwa dan ideologi Pancasila.

Oleh karena itu, pada galibnya Nawacita Kepresidenan Jokowi-Kalla dengan jiwa Tri-Sakti Bung Karno (berdaulat dalam politik; berdikari dalam ekonomi; dan berkepribadian dalam budaya), adalah sebagai jalan menuju kembali kepada REL Pancasila. Nawacita dan jalan Tri-Sakti itu, seyogianya diposisikan sebagai anti-thesis terhadap puncak neo-liberalisasi yang dilaksanakan Kepresidenan Soesilo Bambang Yudhoyono-Budiono sebagaimana tercermin banyak di berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam, seperti; Perkebunan, Kehutanan, PMA, Minerba, Pembebasan Tanah, Privatisasi BUMN, Perikanan, Kelistrikan, Pendidikan, kebijakan berbagai import bahan pangan dan import bidang perminyakan, walaupun beberapa diantaranya ada yang dibatalkan MK RI, seperti beberapa pasal dalam UU Kelistrikan dan Perkebunan. Diperlukan jatidiri dan karakter rezim yang konsisten atas Nawacita dan Tri-Sakti Bung Karno sebagai jalan kembali kepada REL Pancasila untuk menumukan kembali hakikat, jatidiri dan karakter dari Revolusi Indonesia 17 Agustus 1945..

Penulis meyakini, bahwa memang di dalam dinamika politik dunia saat ini, dan tentu saja dalam perspektif teori sistem dunia (Suwarsono dan Alvin Y. SO; 1991, : 175-206), tidak mungkin ada negara yang mampu survive dengan normal, tanpa bekerja sama dengan kekuatan asing. Bahkan kerjasama dengan kekuatan asing itu dalam era dunia kontempores saat ini, merupakan suatu kemutlakan. Namun demikian yang terpenting, bagaimana dalam kerjasama dan menentukan berbagai regulasi dan kebijakan negara, maka kita menjadi penentu dan pemainnya seperti diperlihatkan oleh RRC dan Vietnam sebagai contoh negara yang secara politik tertutup dan konservatif, tetapi secara ekonomi dan sosial mampu menjadi penentu dalam setiap “*power-game*” dalam politik, ekonomi dunia, pertahanan/ militer dan bahkan dunia olahraga (Michael Backman; 2008, : 21-35 dan :183-195). RRC yang sistem politiknya tertutu-konservatif itu, tidak segan-segan menjadi anggota WTO dalam urusan perdagangan internasional dunia.

Dalam konteks ketiga dimensi dari sebuah revitalisasi-reaktualisasi ideologi bangsa dan negara sebagaimana dikemukakan Alfian di atas (1985, : 12-35), menurut hemat penulis kita dapat dapat berkaca pada pengalaman bangsa dan negara Tiongkok/ RRT, bahkan Vietnam, kendatipun karakter ideologinya berbeda dengan Pancasila. Namun Tiongkok, berhasil “*merevitalisasi dan mereaktualisasi*” ideologinya sebagai modal-sosial bagi haluan perjalanan bangsa dan negara Tiongkok yang membuat Tiongkok menjadi sebuah negara besar dengan karakter dan jatidirinya (I Wibowo; 2000). RRC menjadi bangsa dan negara “pemain” di dalam konstruksi globalisasi dunia meskipun RRT tetap berideologi *Sosialisme ala-Tiongkok*.

Dalam konteks ini, menurut pendapat penulis RRT dalam hemat penulis telah melakukan apa yang disebut sebagai “*Tiongkok-isasi Marxisme dan Komunisme*” di RRT buatan Karl Marx yang berasal dari Jerman itu dengan akar-akar tradisi Kongfusianisme menjadi jatidiri bangsa dan negara RRT (Priyanto Wiboeo; 2008) ke dalam kosntruksi ideologi *sosialisme-ala Tiongkok*. Sebaliknya Indonesia yang memiliki Pancasila yang digali dari bumi pertiwi Indonesia oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan ditetapkan menjadi ideologi bangsa dan negara oleh para pendiri bangsa Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945, namun justru para elit negeri ini terus meninggalkan Pancasila, dan bahkan mengantikannya dengan ideologi liberalisme dan neo-liberalisme. Posisi ini menempatkan Indonesia masuk dalam “*the trap-ground*” atau jebakan suatu proses “*re-produksi*” negara pasca-colonial yang membuat RI tetap terjajah dengan sistem koloni yang canggih dan hanya merdeka secara “*simbolik-politik*” seperti dijelaskan dalam teori ketergantungan dan teori negara *pasca-colonial*.

E. Penutup

Pendekatan teori ketergantungan, tampaknya masih relevan untuk memahami kondisi-dinamis hubungan antara negara-negara dunia ketiga dengan negara-negara maju. Utamanya hal ini dapat dilihat dari perspektif teori negara pasca-colonial dari Hamza Alavi, bahwa telah terjadi proses “reproduksi” negara-negara berkembang dalam pola anatomi dan sturktural tata dunia yang relatif sama dengan tata dunia saat negara-negara dunia ketiga itu masih terjajah oleh negara-negara maju secara langsung.

Dengan kata lain, penjajahan negara-negara maju atas negara-negara dunia ketiga, sesungguhnya masih tetap berlangsung dan hanya sistem, bentuk, tata kerjanya dan pola operasinya yang berbeda dengan negara-negara penjajah di abad 19 dan pertengahan abad 20. Bahkan bangunnan sistem dan cara bekerjanya penjajahan itu, di masa kini semakin *shophisticated* atau semakin canggih dan bersifat lunak melalui “*tangan-tangan tak kelihatan*” atau *invisible-hand* dengan melakukan ofensif menguasai dan membentuk regulasi-regulasi yang menguntungkan negara-negara maju yang notabene adalah negara-negara penjajah. Penguasaan atas regulasi-regulasi itu, hanya dapat dimungkinkan dengan melakukan persekongkolan antara pihak penguasa modal asing dengan elit-elit strategis yang memegang tampuk kekuasaan di negara-negara berkembang beserta kaum borjuasi nasional di negara-negara berkembang. Dalam hal demikian, tak sedikit pula, kaum intelektual di negara-negara berkembang itu, yang bahkan bekerja menjadi pemikir para elit strategis itu untuk membentuk regulasi-regulasi guna memudahkan ofensif kekuatan modal asing dan transnasional dengan atau bersama negara penjajah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Ian, 2004, *Ideologi Politik Mutakhir*. Yogyakarta: Qalam.
- Alfian. 1997. "Indonesian Political Thinking: a Review", dalam *Indonesia*, Vol. 11, pp. 193- 200.
- _____, 1995, "*Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*, Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta.
- Ali, Fachry, 1986, *Refleksi "Paham Kekuasaan Jawa" dalam Indonesia Modern*, Cetakan Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Backman, Michael, 2008, *Asia Future Shock: Krisis, Gejolak, Peluang, Kegoncangan, Ancaman dan Masa Depan Asia*, (Terjemahan), Meda Satrio, Cetakan Pertama, Penerbit Ufuk Press, Jakarta.
- Bagin, 2002, *Partai Nasional Indonesia (Sekilas Analisa Kritik Diri)*, Cetakan Pertama, Penerbit Yayasan Seni Budaya "Gema Patriot" & Promedia, Jakarta.
- Budiman, Arief, 1996, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Cetakan Ketiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 1997, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Cetakan Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 1990, *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Crouch, Harold, 1992, *Perkembangan Politik dan Modernisasi*, Cetakan pertama, Yayasan Perkhidmatan, Jakarta.
- Djopari, JRG, 1997, *Teori-Teori Pembangunan*, Cetakan Pertama, PT Yasrif Watampone, Jakarta.
- Fatah, Saefulloh, Eep, 1994, *Masalah dan Prospek Demokrasi Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Feith, Herbert dan L. Castles. Ed. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta.

- Held, David et all, 1999, *Global Transformation: Politics, Economic and Culture*, Stanford, Stanford University, California, USA.
- Hindley, Donald. 1970. "Alirans and the Fall of the Old Order", dalam *Indonesia*, Vol, 9, pp. 23-66.
- Janis, Roy B.B, 2012, *Soeharto MURID (Penerus Ajaran Politik) Soekarno*, Cetakan Pertama, Penerbit Optimist: Jakarta.
- Keller, Suzanne, 1985, (Pengantar Selo Soemadjan), *Penguasa Dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*, Cetakan Pertama, PT Rajawali Press kerjasama dengan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta.
- Muhaimin, Yahya dan Andrews, Collin, Mac, 1978, *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*, Cetakan Pertama, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Organsky, A. F. K, 1984, (Terjemahan), Sinaulan, (Pengantar, Arbi Sanit), *Tahap-Tahap Perkembangan Politik*, Cetakan Pertama, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta.
- Soekarno. 1964. "*Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme*", di dalam, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Departemen Penerangan, pp.1-23.
- Rochadi, Sigit. 2009. *Fragmentasi Gerakan Buruh di Indonesia*. Disertasi Ilmu Sosial pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sanit, Arbi, 1986, *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan*, Cetakan Pertama, PT Rajawali Press, Jakarta.
- Schoorl, JW, 1991, (Terjemahan), RG. Soekadijo, *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*, Cetakan Keenam, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekarno, 2001, *Bung Karno dan Tata Dunia Baru*, (Editor), Imam Toto K. Rahardjo dan Herdianto WK, Cetakan Pertama, PT Gramedia Widya Sarana bekerja sama dengan Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno, Jakarta.

- Suwarsono dan Alvin Y. SO, 1991, *Perubahan Sosial Dan Pembangunan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta.
- Ruslina, Elli, 2013, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Cetakan Pertama, Penerbit Total Media bekerjasama dengan P3IH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta.,
- Rocamora, Eliseo J, 1991, *Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965*, (Terjemahan) Daniel Dhakidae, Cetakan Pertama, PT Grafiti Utama, Jakarta.
- Saputra, Rafael, Andi, 2014, *Dari Uni Soviet Hingga Rusia: Sejarah Panjang, Para Aktor Revolusi, serta Politik Perang Dingin*, Cetakan Pertama, Penerbit Palapa, Jakarta.
- Saragih, Simon, 2008, *Bangkitnya Rusia: Peran Putin dan Eks KGB*, Cetakan Pertama, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Sjamsuddin, Nazaruddin, 1984, *PNI Dan Kepolitikannya*, Cetakan Pertama, PT Rajawali Press, Jakarta.
- Susanto, Dwi dan Zaibuddin Djafar (Editor), 1990, Wiratmo Soekito, “Krisis Ideologi Komunis Dalam Pergolakan Di Uni Soviet dan Eropa Timur”, di dalam, *Perubahan Politik Di Negara-Negara Eropa Timur*, Cetakan Pertama, Kerjasama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, LIPI dengan Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tornquest, Ollen, 2014, (Terjemahan), *Penghancuran PKI*, Cetakan Pertama, Penerbit Komunitas Bambu, Jakarta.
- Wibowo, I, 2000, (Editor, J. Dwi Herry Purnomo, *Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina*, Cetakan Pertama, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama kerjasama dengan Pusat Studi Cina, Jakarta.
- Wibowo, Priyanto, 2008, Penyelaras, Asep Sambodja, *Perubahan Sosial Cina Tahap Pertama: Mao dan Pedesaan (1949-1959)*, Cetakan Kedua, Penerbit Wedatama Widya Sastra, Jakarta.
- Zon, Fadli, 2002, *Gerakan Etnonasionalis Bubarnya Imperium Uni Soviet*, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.